



Informasi Kebijakan *Sustainable Financing* Negara Anggota SBN

Indonesia



Informasi Umum

Populasi : 257,563,815 jiwa

Luas : 1,811,570 km²

Densitas : 142.18 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

Institusi Jasa Keuangan

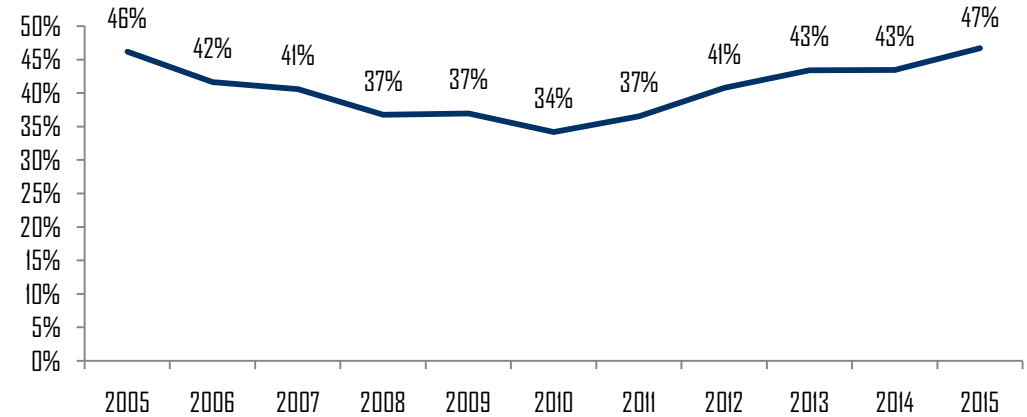
Otoritas SJK : Otoritas Jasa Keuangan

Bank Sentral : Bank Indonesia

Jumlah Bank Umum : 118 bank

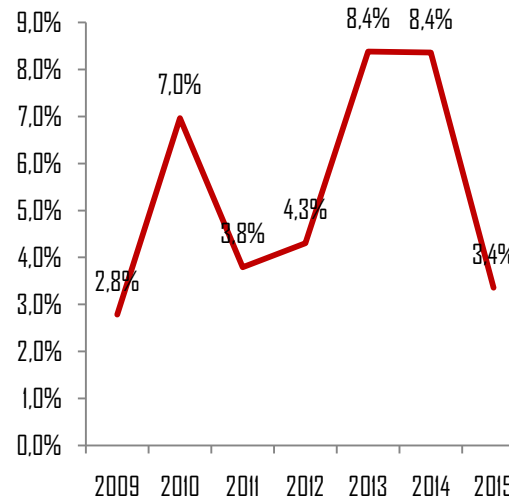
Jumlah BPR : 1.636 bank

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



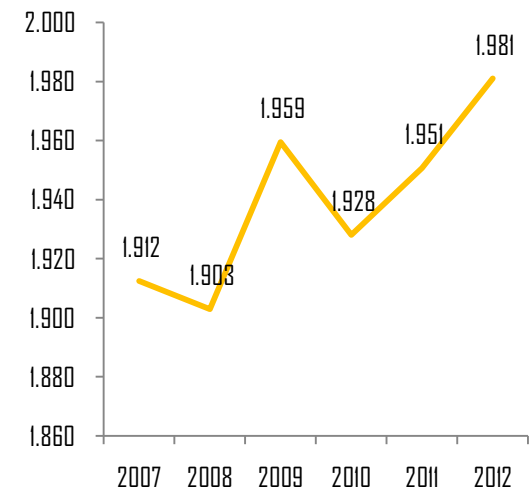
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. **Penilaian Kualitas Aktiva Bank harus memperhatikan aspek kepatuhan aturan PPLH (2005)**, Perbankan harus memasukkan aspek lingkungan hidup ketika menilai kualitas aktiva. Bersifat *Mandatory*.
2. **Penyampaian Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten/Perusahaan Publik**. Merupakan saran bagi Lembaga Jasa keuangan untuk menyampaikan kegiatan keuangan berkelanjutan dalam bentuk laporan kepada publik. Bersifat *Voluntary*.
3. **Roadmap keuangan berkelanjutan (2014)**, menjadi sarana bagi LJK baik perbankan, pasar modal maupun IKNB untuk terus melakukan inovasi produk dan layanannya selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun pembangunan. Bersifat *Mixed*.
4. **Green Lending model Guideline (2015)**, mekanisme pinjaman untuk pembiayaan proyek – proyek hijau. Bersifat *Voluntary*
5. **Insentif Penguatan SDM IJK (2015)**, Bersifat *Voluntary*
6. **The First Mover Sustainable Banking (2015)**, komitmen Perbankan untuk mendukung keuangan berkelanjutan di perbankan (8 Bank Indonesia) , Bersifat *Voluntary*
7. **SF Information Hub**, Merupakan website yang berisi informasi mengenai kegiatan keuangan berkelanjutan. Dengan adanya website tersebut maka industri/ Sektor Jasa Keuangan dapat mengetahui akses data mengenai kebijakan pemerintah dibidang green energy. Bersifat *Voluntary*

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

1. **Komitmen Penurunan GRK (2009)**, Pada tahun 2009, Indonesia memberikan komitmen untuk penanggulangan perubahan iklim antara lain melalui komitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020.
2. **Pembentukan DNPI (2008)**, pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di Forum Internaisonal dalam pengendalian perubahan iklim.
3. **Peningkatan porsi EBT pada Energy Mix (2014)**, Pemerintah akan meningkatkan komposisi pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Keterlibatan Internasional

1. **ICCTF (Indonesia Climate Change Trust Fund)**, CCTF merupakan instrumen kunci dari Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mitigasi dan adaptasi, yang mendukung baik RAN / RAD-GRK serta pelaksanaan RAN-API. Melalui *leveraging* dan penyaluran sumber daya domestik dan dana internasional ke proyek sesuai dengan rencana pelaksanaan RAN / RAD-GRK di Indonesia, ICCTF mendukung target penurunan emisi 26% / 41% di Indonesia.

Data Keuangan:

1. **Kredit Rp (%)**, merupakan jumlah % kredit yang diberikan kepada program untuk mendukung proyek atau infrastruktur hijau.
2. **Sri Kehati Index (Rp)**, Yayasan KEHATI bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks SRI KEHATI yang mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) dengan nama Indeks SRI KEHATI. Tujuan dibentuknya indeks ini adalah untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan terpilih pada indeks SRI KEHATI yang dianggap memiliki bermacam bentuk pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan kepedulian pada lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional.

China



Informasi Umum

Populasi : 1,371,220,000 jiwa

Luas : 9,388,211 km²

Densitas : 146.06 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

Institusi Jasa Keuangan

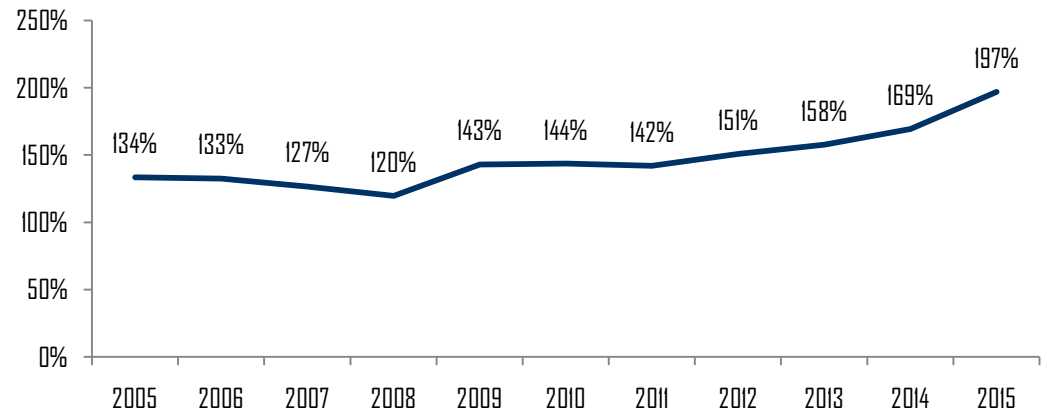
China Banking Regulatory Commission

Jumlah IJK

Bank : 114 bank

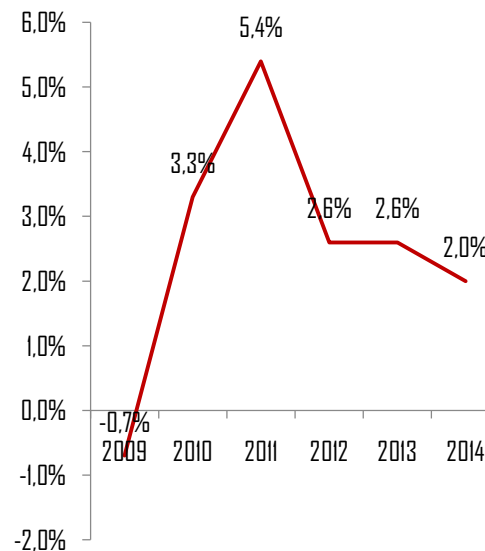
Sumber: China Banking Regulatory Commission

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



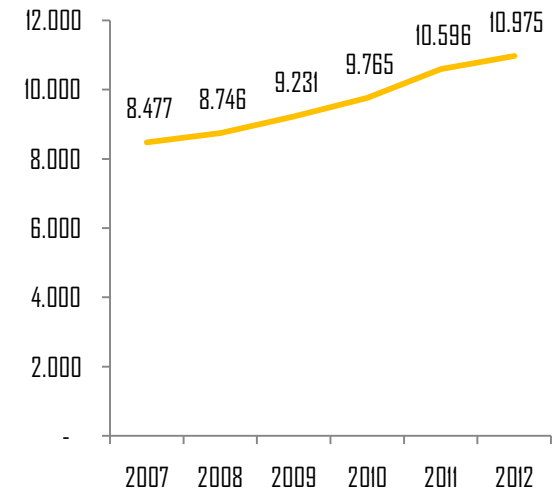
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: Central Bureau of Statistics, China

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. **Green Credit Guidelines (2012)**, Bertujuan untuk mendorong perbankan untuk mengembangkan kredit hijau. Perbankan mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko sosial dan lingkungan yang terdapat pada aktivitas kredit. Bersifat Voluntary.
2. **Green Credit Statistics System (2014)**, Green Credit Statistics terdiri dari 2 bagian Statistik Formulir Kredit untuk Usaha Terkena Lingkungan Besar dan Risiko Keselamatan (Lampiran 1) dan Statistik Formulir Kredit untuk Proyek dan Layanan Perlindungan Lingkungan dan Pengurangan Emisi (Lampiran 2). Petunjuk pengisian Formulir Hijau Statistik Kredit dapat ditemukan di Lampiran 3. Bersifat Voluntary.
3. **Green Credit Key Performance Indicators (2015)**, Semua lembaga perbankan diminta untuk memfasilitasi dan melaksanakan kredit hijau yang mengikuti persyaratan Kredit. Semua kantor lokal dari Bank Central Cina (CBRC) dapat memfasilitasi dan benar-benar melaksanakan pekerjaan *self-assessment* yang relevan sesuai dengan situasi nyata dari lembaga perbankan di bawah yurisdiksi perbankan itu sendiri. Bersifat Mandatory.

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

1. **Integrated Working Plan of the State Council for Energy Conservation and Emission Reduction during the 12th Five-year Period (2007) dan Comprehensive Energy Saving and Emission Reduction Scheme of the 12th Five-Year Plan (2011)**, komitmen pemerintah dalam rangka mengurangi konsumsi energi dan mengurangi polutan sebagai target dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Komitmen untuk melakukan konservasi energi dan pengurangan emisi.
2. **Comments of the State Council on Strengthening Environmental Protection Priorities (2007)**
3. **Green Credit Policy (2007)**, bank memberikan 80-90% dana untuk perusahaan di Cina dengan kredit yang jauh dari kegiatan yang menghabiskan energi yang tinggi dan jauh dari polusi. Kebijakan tersebut juga digunakan untuk mendukung konservasi energi dan pengurangan emisi dalam jangka panjang.
4. **Opinions of the State Council on Accelerating the Development of Energy Saving and Environmental Protection Industries (2013)**, Opini dari pemerintah yang berfokus pada pengembangan industri lingkungan dengan target tujuan tiga tahun kedepan. Meningkatkan total output industri lingkungan dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 15% dengan tujuan untuk mencapai konservasi energi dan pengurangan emisi.
5. **Energy Efficiency Lending Guidance (2015)**
6. **regulates energy efficiency (EE) and emission reduction (2015)**

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Isu Lingkungan dan Sosial:

1. **Kesehatan Publik (pencemaran air)**
2. **Kerusuhan Sosial (kelangkaan air yang dikarenakan kelangkaan air)**
3. **Produktivitas Sosial** , total biaya untuk degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya adalah 8% 12% dari PDB per tahun. Biaya terbesar adalah di bidang kesehatan, dimana kerugian yang terkait dengan polusi udara perkotaan diperkirakan oleh bank dunia lebih dari \$ 20 miliar.

Brazil



Informasi Umum

Populasi : 207,847,528 jiwa

Luas : 8,358,140 km²

Densitas : 24.87 jiwa/km²

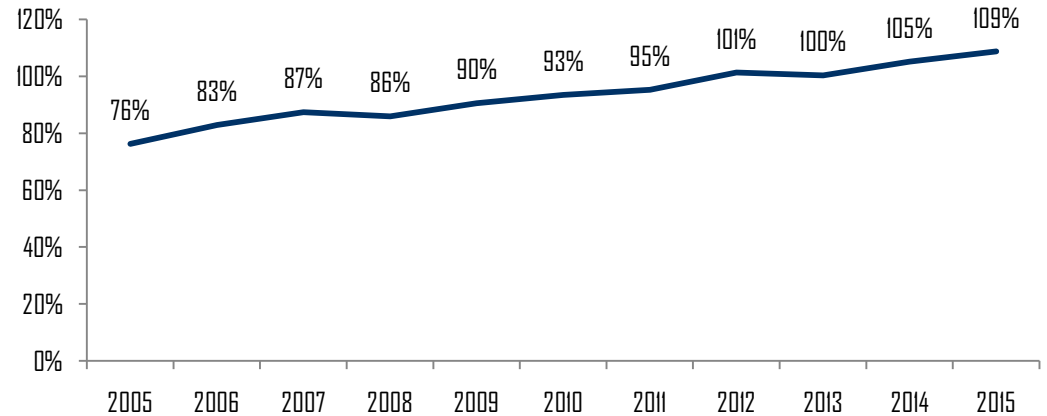
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Institusi Jasa Keuangan

Central Bank of Brazil

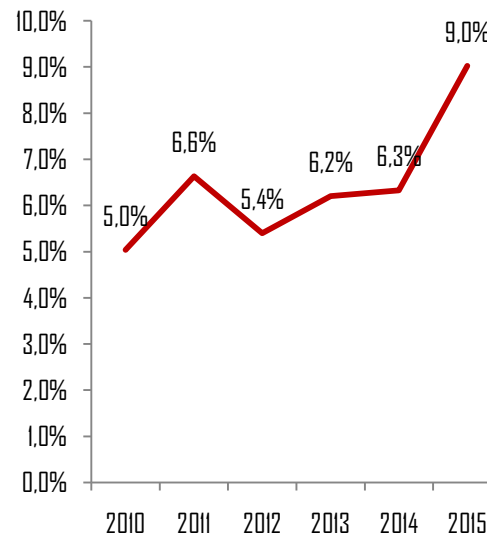
Bank : 43 bank

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



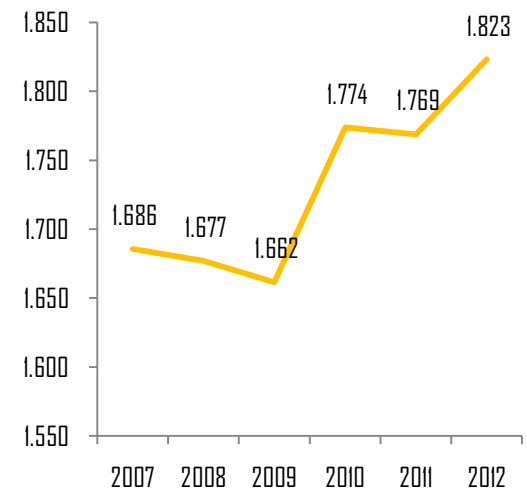
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: World Development Indicator, World Bank

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. **Green Protocol (2008)**. Bersifat Voluntary
2. **Regulation on Environmental and Social Risk Management (2014)**. prinsip-prinsip dan pedoman yang memandu pelaksanaan bisnis sosial-lingkungan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Bersifat Mandatory.

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

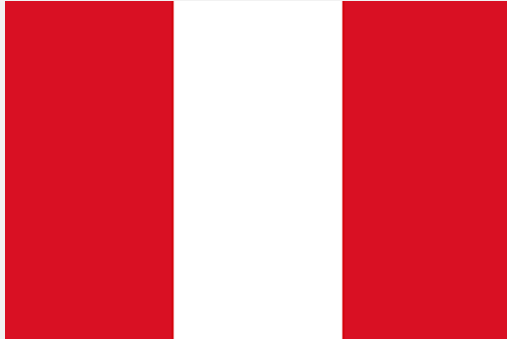
1. **low carbon agriculture plan (2010)**, rencana yang bertujuan untuk mempromosikan teknik untuk mengurangi emisi dan penyerapan karbon, mengembangkan produktivitas dan pengurangan penebangan hutan.
2. **credit for mitigation and adaptation to climate change (2011)**
3. **financial institutions socio-environmental responsibility (2014)**

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Isu Lingkungan dan Sosial:

1. **Penggundulan Hutan**
2. **Hujan Asam**
3. **Spesies Langka Brazil yang terancam punah**
4. **Polusi Udara**
5. **Kemiskinan**
6. **Kejahatan**
7. **Kurangnya pendidikan**
8. **Kematian Bayi**

Peru



Informasi Umum

Populasi : 31,376,670 jiwa

Luas : 1,280,000 km²

Densitas : 24.51 jiwa/km²

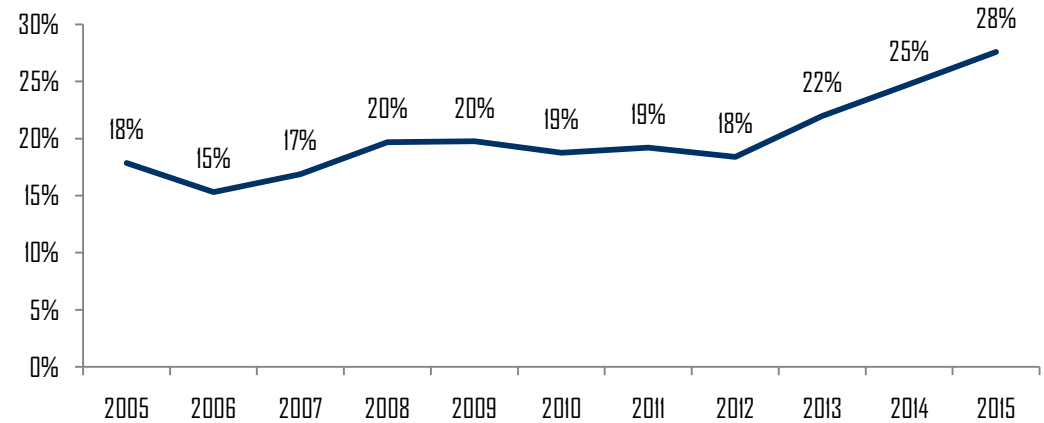
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Institusi Jasa Keuangan

Superintendence of Banks, Insurers, and Private Pension Funds of Peru (SBS)

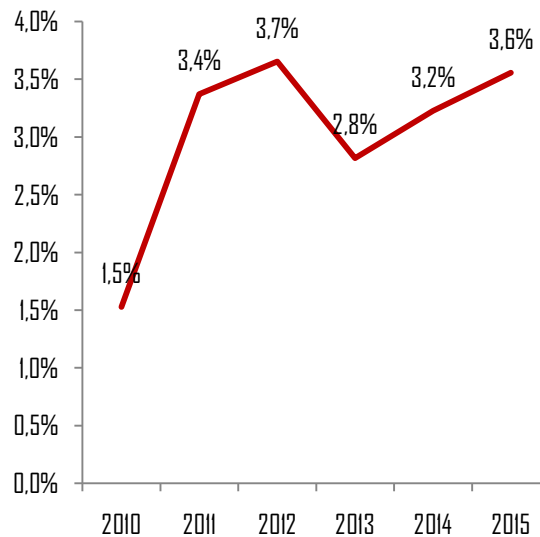
Bank : ± 17 bank

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



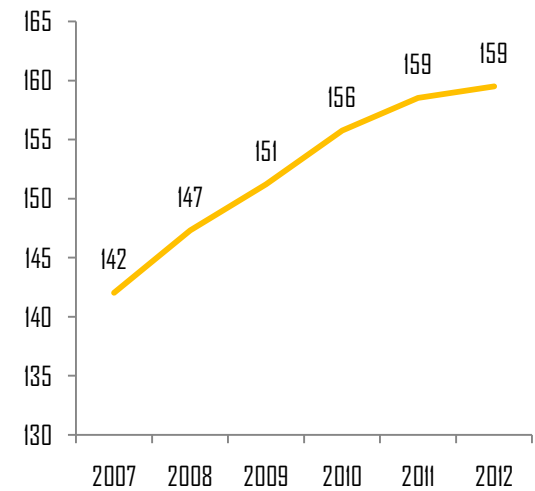
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: World Development Indicator, World Bank

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. **Regulation for Social and Environmental Risk Management (2015).** Bersifat Mandatory. Regulasi yang terbagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama menjelaskan mandat dari regulasi. Bagian kedua menjelaskan detail dari fitur risiko sosial lingkungan. Bagian Ketiga mendeskripsikan pendekatan tradisional dengan risiko sosial lingkungan. Bagian keempat menjelaskan due diligence. Bagian kelima menjelaskan elemen kunci dari regulasi. Bagian keenam menjelaskan deskripsi dari regulasi dan kesimpulan dokumen.

Isu Lingkungan dan Sosial:

Penggundulan hutan (penambangan dan pertanian)

Vietnam



Informasi Umum

Populasi : 91,703,800 jiwa

Luas : 310,070 km²

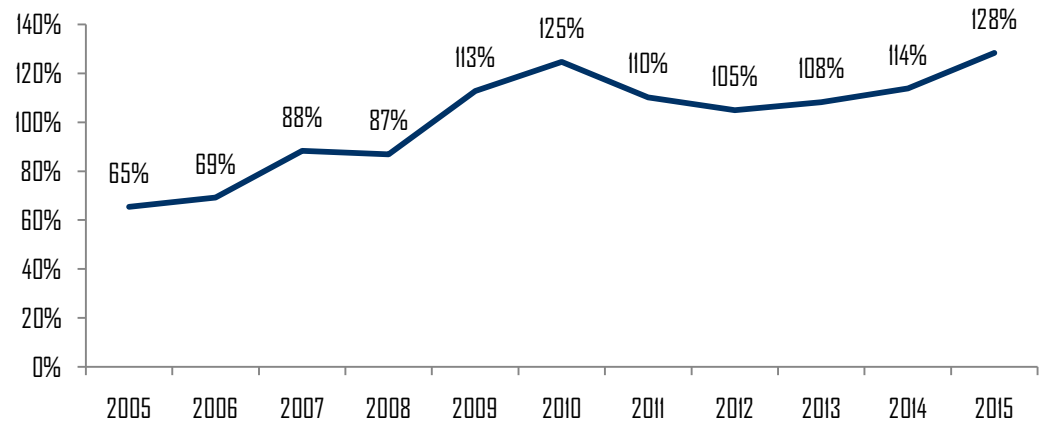
Densitas : 295.75 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

Institusi Jasa Keuangan

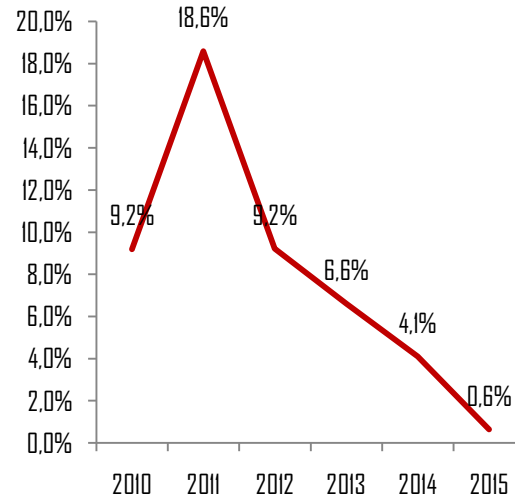
Bank : ± 60 bank

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



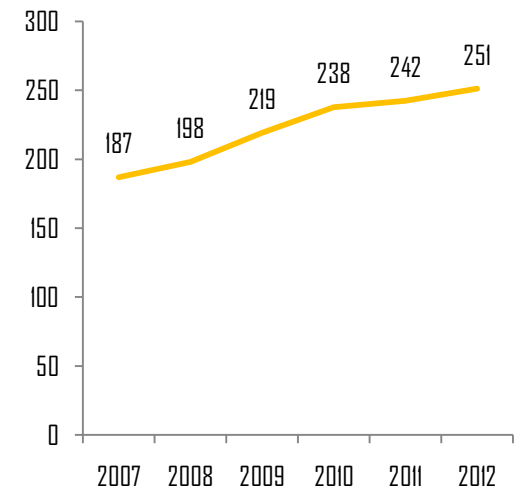
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: General Statistics Office of Viet Nam

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. **Directive on Promoting Green Credit Growth and Environmental – Social Risks Management in Credit Granting Activities (2015).** Penyesuaian dan peningkatan peraturan kredit dengan tujuan pertumbuhan kredit, fokus pada pemberian kredit untuk proyek-proyek, produksi dan kegiatan yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Berkontribusi pada pelaksanaan target pertumbuhan hijau dari komunitas bisnis. Dengan demikian, tujuan utama yang ingin dicapai atau pertumbuhan hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bersifat Mandatory.
2. **Managing Environmental and Social Risk in Lending Activities (2015).** Merupakan prinsip dan kriteria untuk institusi keuangan dalam mengkategorikan pinjaman dan kegiatan investasi berdasarkan risiko lingkungan dan sosial dan untuk mengidentifikasi kegiatan pinjaman dan investasi yang diperlukan untuk penilaian risiko lingkungan dan sosial. Bersifat Mandatory.

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

1. **National Action Plan on green growth in Vietnam For the Period of 2014-2020 (2014).** Merupakan rencana kerja pertumbuhan hijau di vietnam yang terdiri dari 4 (empat) tema utama dan 12 kelompok kegiatan dan 66 (enam puluh enam) kegiatan khusus. Tema pertama: menyiapkan lembaga dan merumuskan tindakan pertumbuhan hijau di tingkat nasional dengan 8 (delapan) kegiatan yang dibagi menjadi 2 kelompok gorup. Tema Kedua: mengurangi intensitas emis gas rumah kaca dan mempromosikan penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan dengan 20 (dua puluh) kegiatan yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Tema ketiga: *Greening production* dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Tema Keempat *Greening lifestyle* dan mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan.

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Data Keuangan

- 1. Credit/loan application**
- 2. Credit/loan applications declined after being E&S risks evaluated**
- 3. Credit/loan applications approved after being E&S risks evaluated**
- 4. Total outstanding value of credits/loans granted which have been evaluated on E&S risks**
- 5. Total outstanding value of credits/loans being onhold due to E&S risks**
- 6. Value of green credit/loan granted**
- 7. Total outstanding value of green credits/loans granted**
- 8. Total outstanding value of green credits/loans granted Total outstanding value of credits/loans granted**

Isu Lingkungan dan Sosial:

Oil Slicks, Sungai Mati, Polusi Udara polusi udara, polusi air, dan polusi suara, terjadi di pusat-pusat perkotaan dan industri seperti Kota Ho Chi Minh dan Hanoi. Masalah yang paling serius adalah pengolahan limbah. tekanan penggunaan lahan telah menyebabkan masalah lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi berat, erosi tanah, sedimentasi sungai, banjir, penurunan hasil ikan, dan pencemaran lingkungan pesisir dan laut.

Mexico



Informasi Umum

Populasi : 127,017,224 jiwa

Luas : 1,943,950 km²

Densitas : 65.34 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

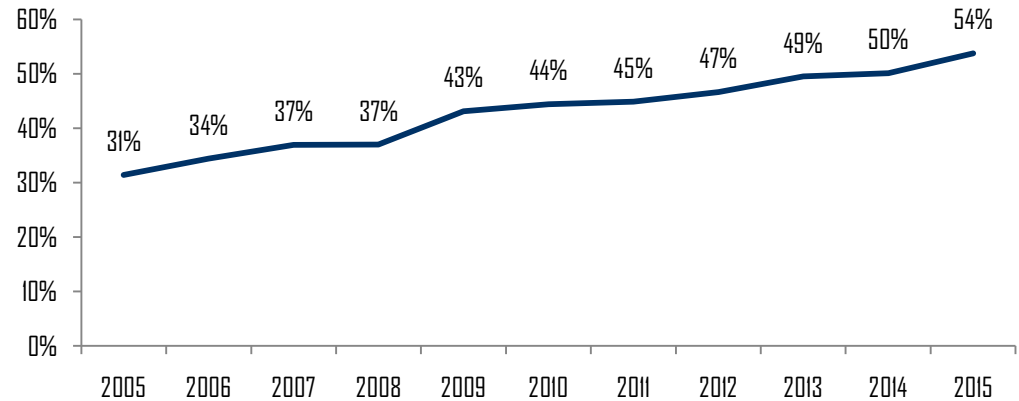
Institusi Jasa Keuangan

Mexican Bankers Association (ABM)

Bank : ± 85 bank

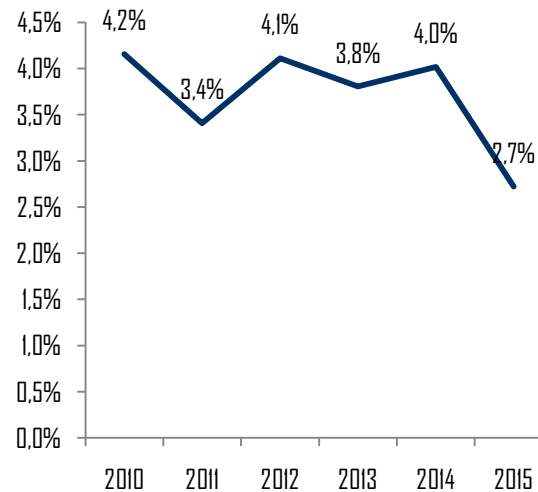
<http://listofbanksin.com>

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



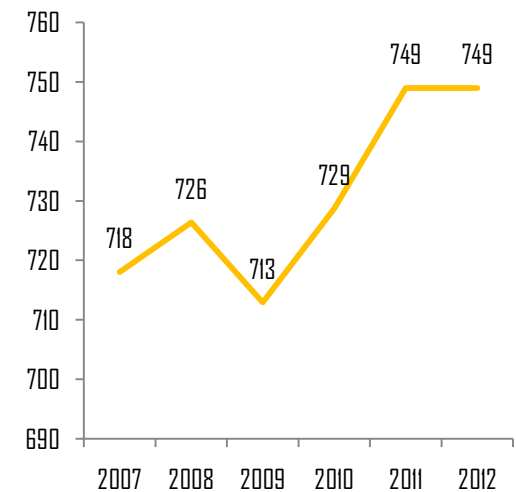
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: World Development Indicator, World Bank

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

**Kebijakan Keuangan Berkelanjutan
Sustainability Protocol (2016).** Bersifat Voluntary

**Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Inclusive Green Growth (2012)**

Isu Sosial dan Lingkungan:

- 1. Polusi Udara**
- 2. Penurunan Muka Tanah**

Bangladesh



Informasi Umum

Populasi : 160,995,642 jiwa

Luas : 130,170 km²

Densitas : 1.236.81 jiwa/km²

Sumber: World Bank Development Indicator

Institusi Jasa Keuangan

Regulator : Bangladesh Bank

Jumlah IJK

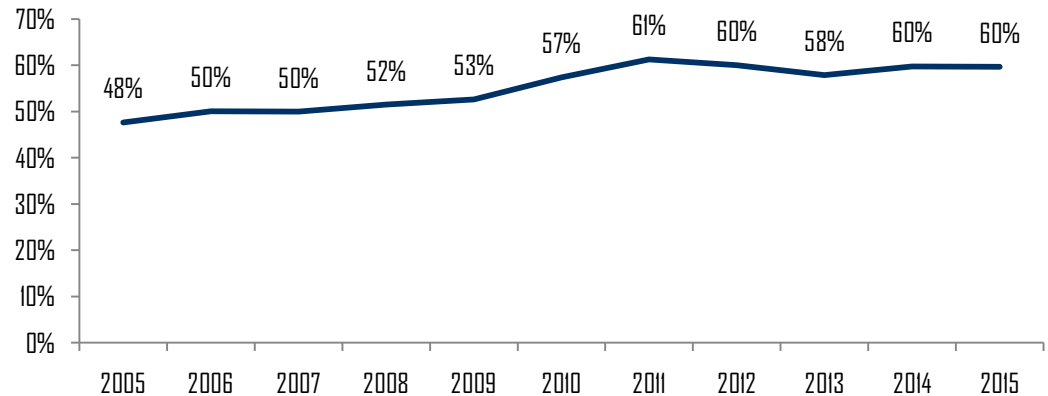
Bank : 60 bank

IKNB : 31 institusi

Pasar Modal : ± 440 entitas

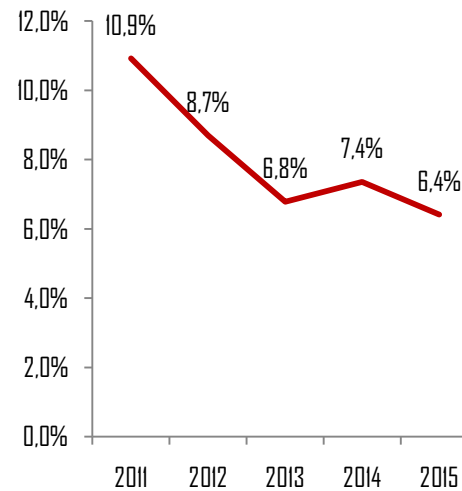
Sumber: Bangladesh Bank, 2016

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



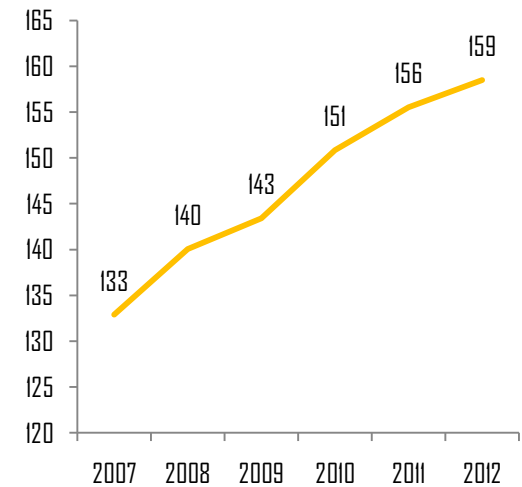
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: Bangladesh Bureau of Statistics

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (1/2)

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. ***Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) in banks and financial institutions in Bangladesh (2008) - Bank Sentral***

Mendorong bank untuk menginternalisasi pertimbangan sosial dan lingkungan dalam bisnis proses sebagai strategi untuk mengembangkan bank. Bersifat *voluntary*.

2. ***Policy Guidelines for Green Banking (2011) - Bank Sentral***

Memberikan panduan bagi sektor perbankan untuk menerapkan *green banking*. Prosesnya dibagi 3 tahap; 1) internalisasi ESG dalam proses internal (mempertimbangkan risiko ESG dalam manajemen); 2) menyusun *sector specific environmental policy* dan *green strategic planning*, edukasi konsumen, dan pelaporan; 3) menyusun produk inovatif khusus (*green products*) dan menstandarisasi pelaporan dengan standar internasional Terdapat jangka waktu pelaksanaannya, bersifat *voluntary*, tapi memberikan insentif bagi bank yang melaksanakan.

3. ***Environmental Risk Management (ERM) Guidelines for Banks and Financial Institution (2011) - Bank Sentral***

Menyajikan panduan *step by step* untuk menginternalisasi risiko lingkungan dalam manajemen risiko bank. Panduan ini juga memberikan contoh ceklis untuk proses *due dilligent*.

4. ***5% Loan Portfolio for Green Investment (2015) - Bank Sentral***

Bank sentral mewajibkan bank-bank untuk menyalurkan kredit/pembiayaan untuk investasi hijau dengan rasio minimal 5% dari total portofolio kredit/pembiayaan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (2/2)

5. *Green Transformation Fund* (2016) - Bank Sentral

Menyediakan *transformation fund* dengan anggaran US\$200 miliar bagi industri dengan tujuan ekspor (dalam bentuk *refinancing/revolving loan fund*) e.g textiles. Dana dalam bentuk US\$ dan hanya bisa disalurkan oleh bank devisa.

Kebijakan Pemerintah terkait Pembangunan Berkelanjutan

1. **Brick Making and Kiln Establishment (Control) Act 2013 - Kementerian Lingkungan**

Mengatur industri batu bata agar beroperasi tanpa merusak lingkungan (kewajiban menggunakan teknologi ramah lingkungan dan larangan beroperasi di kawasan-kawasan tertentu)

2. **The Industrial Policy 2010**

Berisi strategi terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Faktor lingkungan dipertimbangkan dalam strateginya.

3. **Renewable Energy Policy in 2008**

Sebagai acuan untuk pengembangan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan energi terbarukan. Melibatkan sektor jasa keuangan.

Green Financing di Bangladesh

Jenis Pembiayaan	Jumlah	Tahun
Green Refinancing	US\$ 13 juta	2010 - 2014
Kredit untuk Sektor Hijau Kunci	US\$ 0.5 juta	2014
Kredit untuk Industri dengan Pengolah Limbah (<i>indirect green finance</i>)	US\$ 4.5 juta	2014
Kredit untuk sektor dengan dampak lingkungan tinggi dengan melakukan <i>environmental due diligence</i>	US\$ 20 juta	2014

Sumber: UNEP, 2015

Colombia



Informasi Umum

Populasi : 48,228,704 jiwa

Luas : 1,109,500 km²

Densitas : 43.47 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

Institusi Jasa Keuangan

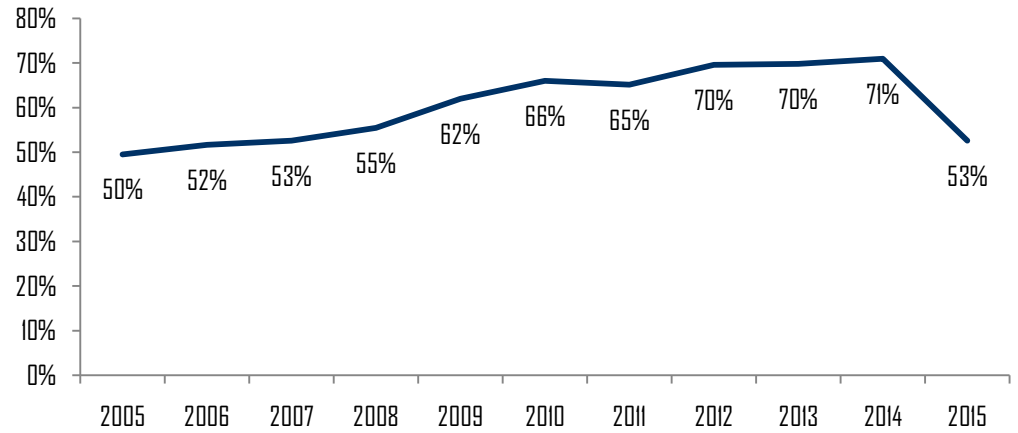
Otoritas SJK : Financial Superintendency of Columbia

Bank Sentral : Bank of the Republic (Colombia)

Bank ± 100 dan LJK lainnya ± 300

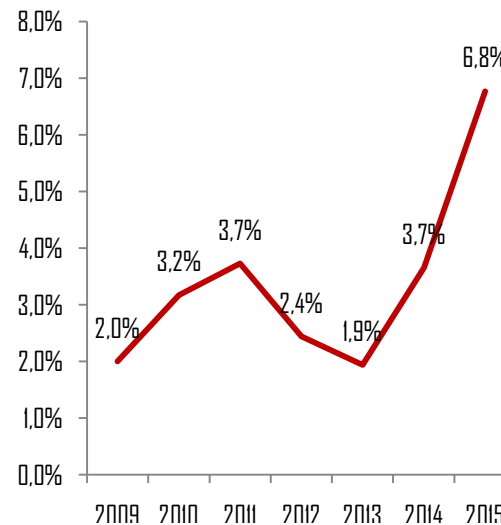
Sumber: Financial Superintendency of Columbia, 2016

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



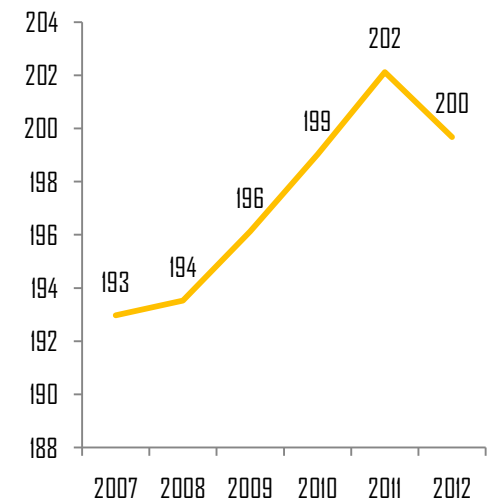
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: DANE, Colombia Statistic Bureau

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (1/2)

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. Colombia Green Protocol (2012) – Asosiasi Perbankan

Merupakan hasil kolaborasi antara asosiasi perbankan dan pemerintah. Colombia Green Protocol menyebutkan strategi-strategi SJK dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah; 1) meningkatkan portofolio produk perbankan untuk proyek-proyek dengan manfaat sosial dan lingkungan, dengan mekanisme kredit yang beda dengan proyek lainnya (*rate, maturity, dan lainnya*); 2) mengembangkan kebijakan dan prosedur analisa dampak lingkungan dan sosial untuk kegiatan dan/atau proyek yang akan dibiayai; 3) mendorong proses internal yang memperhatikan penggunaan SDA yang terkait lingkungan dan sosial dalam *business process* lainnya (pengadaan dan kontrak layanan); 4) pemerintah mendukung dengan penyusunan kebijakan, guidelines, informasi, dan kriteria yang mendukung sektor perbankan

2. Pendanaan/Insentif Perbankan

Untuk perbankan; 1.) *Soft green loans*, terutama untuk UMKM, diberikan oleh *National Development Bank*; 2) *Environmental credit line* (dikoordinasi *National Centre for Cleaner Production and Environmental Technologies*) sampai 25% *initial investment* di-reimburse; 3) Pendanaan *Clean Development Mechanism (Kyoto Protocol) - Certified emission reduction (CER) credits details data*; 4) Donor Domestik dan Internasional (*Clean Technology Fund & Clean Investment Fund* melalui *Inter-American Development Bank*; fasilitas US\$90 juta untuk EBT dan efisiensi dan produksi hijau)

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (2/2)

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

1. National Development Plan 2014-2018 (Strategy Policies) – Pemerintah Pusat

Dokumen ini berisi tentang rencana strategis pembangunan Kolombia dalam jangka waktu 2014 – 2018. Rencana strategis mengenai pembangunan berkelanjutan tercantum dalam dokumen ini. Di Indonesia, dokumen ini hampir sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

2. Low Carbon Development Strategy (2010)

Tujuan utamanya agar Kolombia tetap bisa mencapai target pertumbuhannya, tetapi tanpa adanya penambahan gas rumah kaca. Strategi ini memuat action plan untuk beberapa sektor (industri pengolahan, energi, pertambangan, transportasi, perumahan, sampah, dan pertanian). Strategi ini komprehensif karena memuat identifikasi dan asesment alternatif dan peluang, rancangan dan implementasi kebijakan, rencana, dan pengukuran, sistem untuk monitoring, pelaporan, dan verifikasi, dan juga *capacity building* dan penyusunan platform untuk komunikasi dan koordinasi. Pendanaan bekerjasama dengan UNDP sedangkan koordinator teknis bekerjasama dengan universitas (Universidad de los Andes)

3. Strategy for Resource Mobilisation (2009)

Memuat target, sasaran, dan *action plan* yang ditujukan untuk meningkatkan aliran pendanaan domestik maupun internasional untuk *biodiversity*.

4. Insentif *Green Investment*

Insentif dalam bentuk *economic incentive*, *tax-related incentive*, dan *R&D incentive*. *tax exclusion*, *exemption*, and *discount*, *grant/subsidies* diberikan untuk lima hal; 1) *Environmental protection* secara umum (pengadaan alat/mesin ramah lingkungan dan sejenisnya); 2) *Biodiversity conservation*; 3) *Reforestation*; 4) *Low carbon development*; 5) *Production of biofuel*.

Mongolia



Informasi Umum

Populasi : 2,959,134 jiwa

Luas : 1,553,560 km²

Densitas : 1.90 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

Institusi Jasa Keuangan

Regulator : Mongolian Bank

Bank Umum : 13 bank

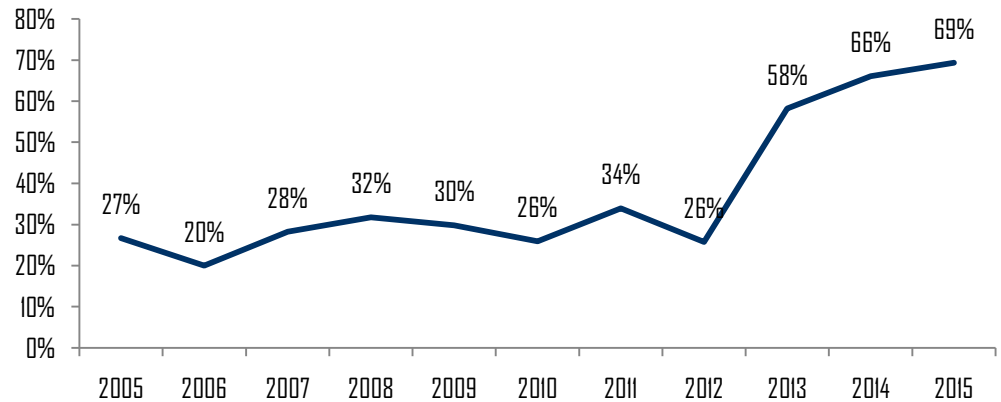
Bank Pembangunan : 1 bank

KCBA : 5 KCBA

IKNB : 212 institusi

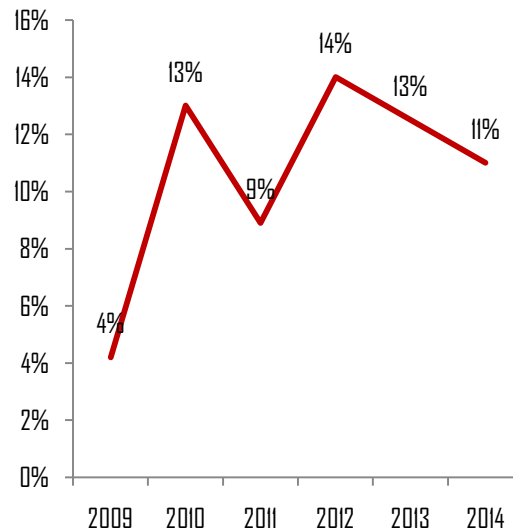
Sumber: Mongolian Banker Association, 2014

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



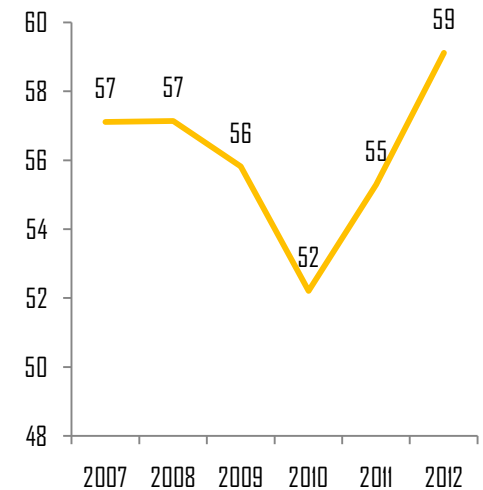
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: Mongolian Statistical Information Service

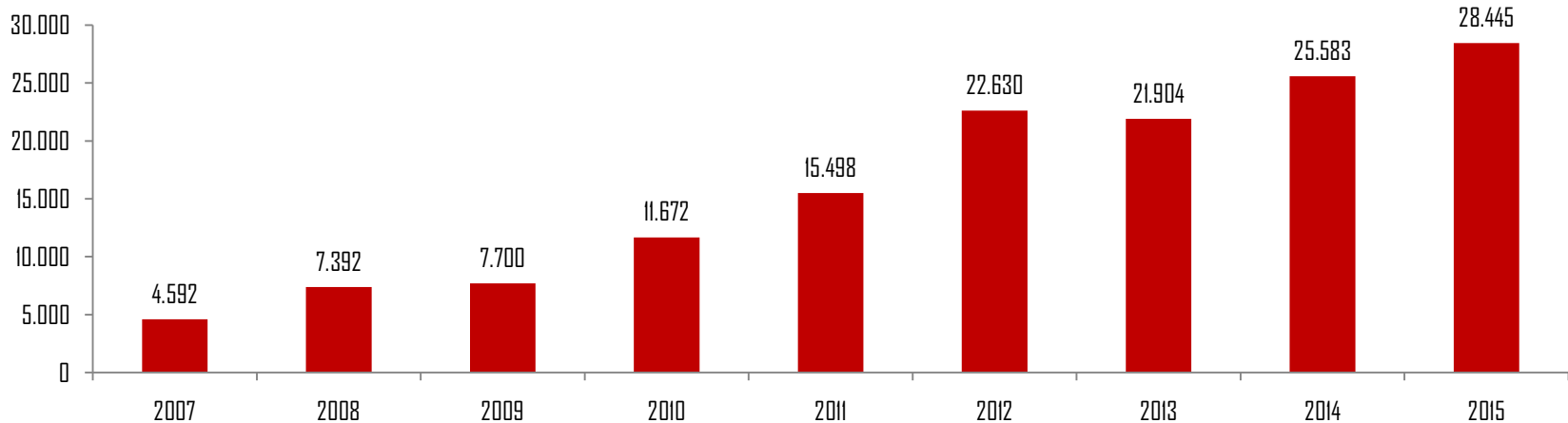
Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (1/2)

Investasi Modal untuk Proteksi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam



Sumber: Mongolian Statistical Information Service

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. **Mongolian Sustainable Finance Principle/MFSP (2014)** – Asosiasi Bankir Mongolia

Kerangka kerja *voluntary* yang digunakan untuk membantu bank lokal untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam keputusan memberikan pinjaman dan pengembangan produk, yang ditujukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. 3 Prinsip: *We will protect the natural environment, people and communities, and cultural heritage. We will promote green economic growth, financial inclusion, ethical finance and corporate governance, and transparency and accountability. We will practice all of these principles and report on a regular basis on our progress.* Meski MFSP bersifat *voluntary*, seluruh bank komersil dan bank pembangunan mengimplementasikannya,

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (2/2)

2. Sector Guidelines (2014) – Asosiasi Bankir

Dokumen ini berisikan panduan empat sektor, yaitu pertambangan, pertanian, konstruksi, dan industri pengolahan. Dengan mengacu kepada buku panduan ini, bank dapat mengurangi risiko *default* untuk empat sektor ini dan mengidentifikasi peluang bisnis baru, seperti energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Penyusunan panduan ini mengacu kepada *international benchmarks*

3. MSFP Implementation Reporting (2016) – Bank Sentral

Berisi peraturan yang mewajibkan bagi bank komersil untuk menyusun pelaporan mengenai implementasi *Mongolian Sustainable Finance Principle* (MFSP) di bank masing-masing. Karena MFSP diimplementasikan oleh seluruh bank umum dan pembangunan (kecuali KCBA), MFSP ini bersifat *mandatory*.

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

1. Green Development Policy (2014)

Merupakan sebuah kerangka kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan Mongolia yang bersifat berkelanjutan yang berbasiskan kepada konsep pembangunan hijau melalui partisipasi dan inklusivitas masyarakat.

2. Fiscal Incentive

Insentif fiskal tersebut dalam bentuk pemotongan PBB dan PPh. Insentif ini diberikan kepada sejumlah sektor prioritas Mongolia, yaitu energi, panas bumi, jaringan kabel, penyediaan air bersih, sterilisasi, dan transportasi.

Turkey



Informasi Umum

Populasi : 78,665,830 jiwa

Land : 769,630 km²

Densitas : 102.21 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

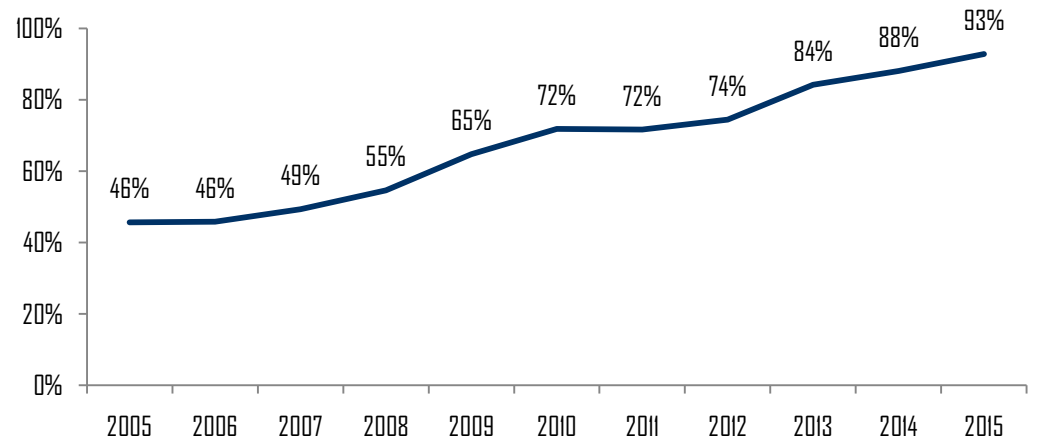
Institusi Jasa Keuangan

Regulator : Banking Regulation and Supervision Agency

Bank : 47 bank

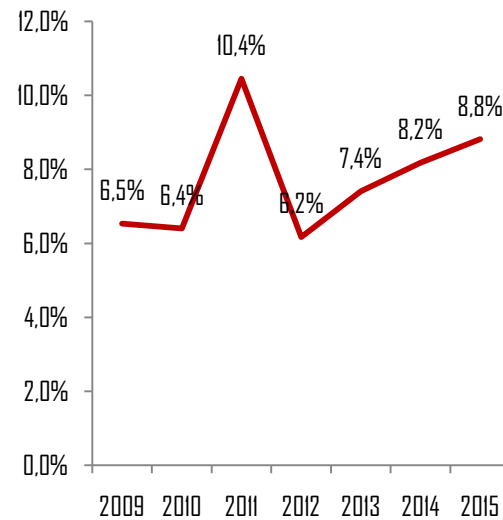
Sumber: Bank Association of Turkey, 2015

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



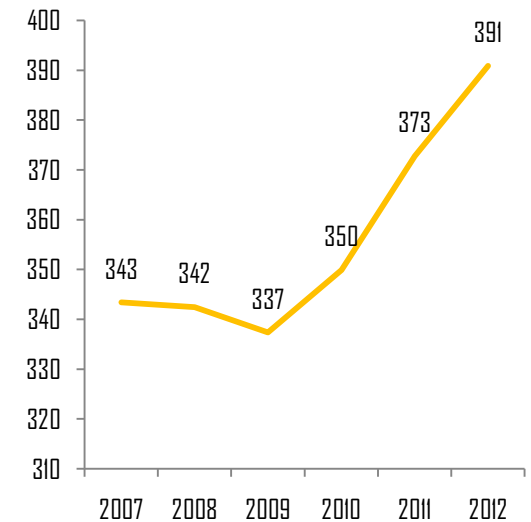
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: Turkstat, Turkey Gov

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (1/2)

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

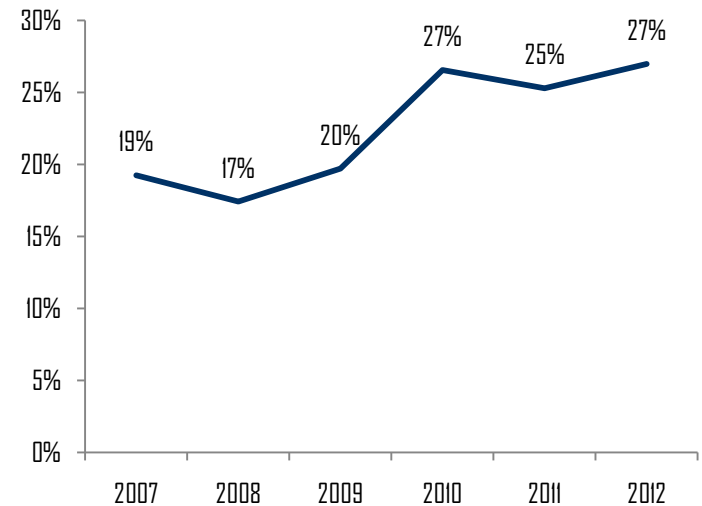
1. Sustainability Guidelines for The Banking Sector (2014) – Asosiasi Perbankan

Merupakan panduan dan bahan referensi bagi perbankan untuk menerapkan asas keberlanjutan dalam sektor perbankan dan keuangan. Panduan ini bersifat *voluntary* dan informasional saja. Panduan ini cukup komprehensif karena meliputi panduan untuk internalisasi aspek lingkungan dan sosial dalam bisnis proses (pembiayaan dan *in-house management*), hak asasi manusia dan hak pegawai, komunikasi dan *stakeholder engagement*, tata kelola, *capacity building*, dan monitoring dan pelaporan

2. Bursa Istanbul Sustainability Index (2014) – Istanbul Stock Exchange

Di tahun 2014, Istanbul Stock Exchange meluncurkan Bursa Istanbul Sustainability Index (BIST Sustainability Index). Indeks ini diluncurkan sebagai insentif bagi perusahaan-perusahaan yang listing dalam burse efek ini untuk mengelola lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dalam kegiatan bisnisnya.

Porsi Energi Terbarukan Turki



Sumber: Turkstat, Turkey Gov

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan (2/2)

3. **Clean Technology Fund**

Merupakan *funding window* dari Climate Investment Funds (CIF), yang ditujukan untuk transformasi negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan teknologi dengan *low carbon* dengan tujuan panjang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Turki dalam hal ini memanfaatkan fasilitas ini.

4. **Small Enterprises Loan Programme (SELP)**

Program ini merupakan program untuk dalam rangka pembangunan yang inklusif. Program ini sudah dua kali dilakukan, dimana pada SELP 1 dana pinjaman yang diberikan kepada UMKM mencapai €90 million. Di tahun 2013, bank telah menyalurkan pinjaman kepada 20.237 debitur dengan total pinjamans sebesar €211.7 juta. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian investor untuk menyediakan pendanaan jangka panjang ke UMKM. Program ini merupakan kerjasama dengan EU, Council of Europe Development Bank (CEB), dan KfW-Entwicklungsbank.

5. **Turkish Grameen Microfinance program**

Program ini dikelola oleh *Turkish Foundation for Waste Reduction*. Di tahun 2010, program ini menyalurkan dana pinjaman mencapai \$27 juta untuk 41,000 debitur. Tingkat payment rate mencapai 100%.

Nigeria



Informasi Umum

Populasi : 182,201,962 jiwa

Luas : 910.770 km²

Densitas : 200.05 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

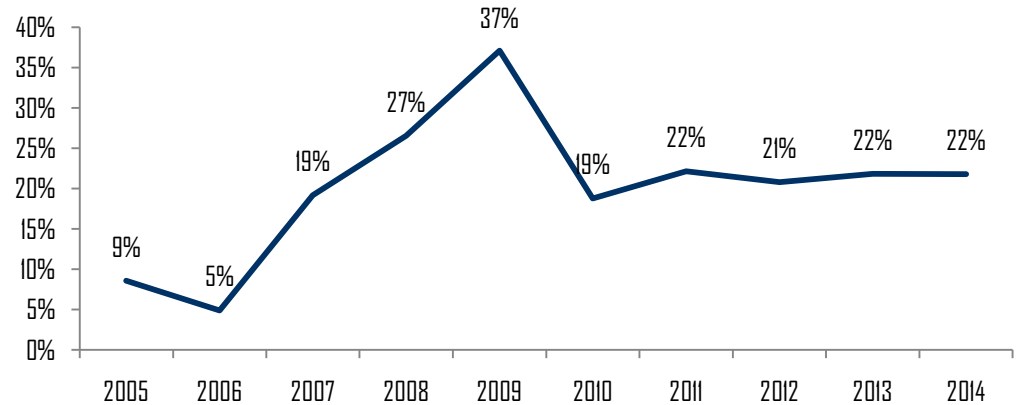
Institusi Jasa Keuangan

Regulator : Central Bank of Nigeria

Jumlah Bank : 22 bank

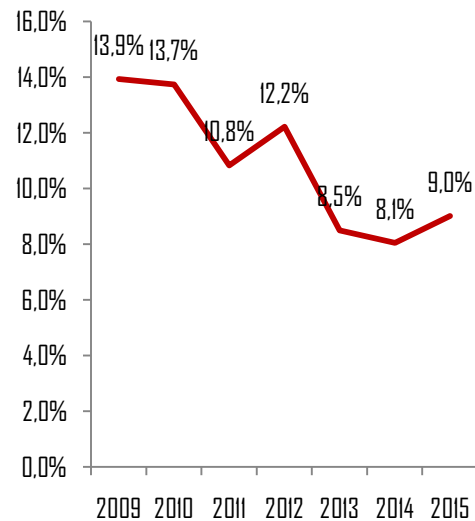
Sumber: Central Bank of Nigeria

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



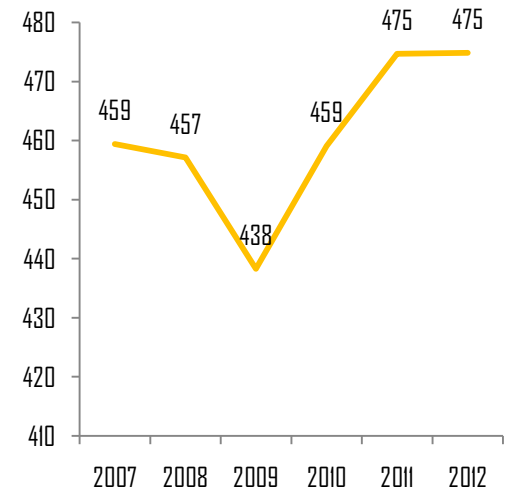
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: Nigeria National Bureau of Statistics

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. Nigeria Sustainable Banking Principle (2012) – Central Bank

Diterbitkan sebagai surat edaran yang bersifat *mandatory* bagi bank, *discount houses*, dan institusi keuangan pembangunan (*development finance institutions*). Terdapat tujuh prinsip yang tercantum didalamnya, yaitu; 1) manajemen risiko lingkungan dan sosial; 2) *environmental and social footprint*; 3) hak asasi manusia; 4) pemberdayaan wanita; 5) inklusi keuangan; 6) E&S *governance*; dan 7) *capacity building*. Secara detail, prinsip prinsip tersebut dicantumkan dalam *The Nigeria Sustainable Banking Principles Guidance Notes*

2. Sector Specific Sustainable Banking Principle (2012) – Central Bank

Bersamaan dengan penyetujuan *Nigeria Sustainable Banking Principle*, bank sentral juga menerbitkan prinsip keuangan berkelanjutan spesifik untuk tiga sektor. Dokumen tersebut adalah *Nigeria Sustainable Banking Principles Power Sector Guidelines*, *Nigeria Sustainable Banking Principles Agricultural Sector Guidelines*, dan *Nigeria Sustainable Banking Principles Oil Sector Guidelines*.

Kenya



Informasi Umum

Populasi : 46,050,302 jiwa

Luas : 569,140 km²

Density : 80.91 jiwa/km²

Sumber: World Development Indicator, World Bank

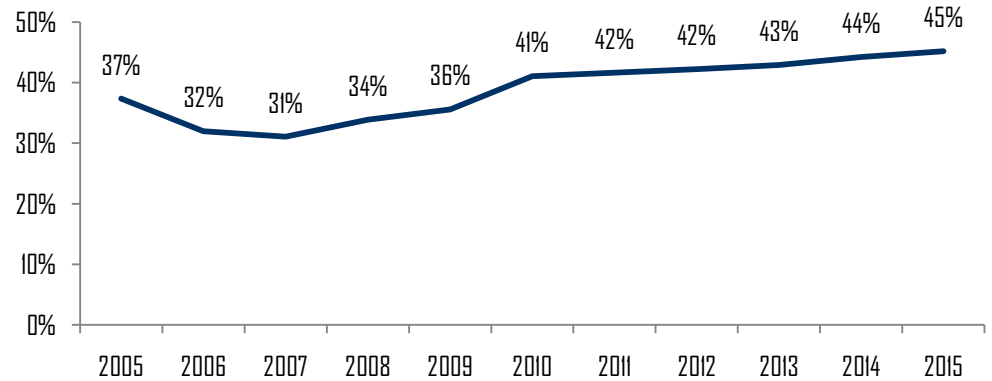
Institusi Jasa Keuangan

Regulator : Kenya Central Bank

Bank : 46 bank

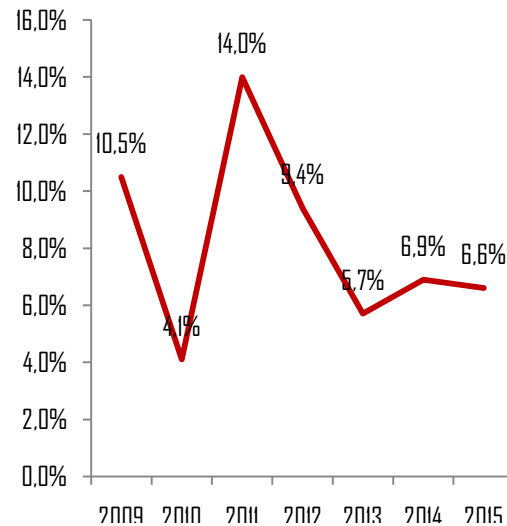
Sumber: Kenya Bankers Association

Rasio Kredit SJK terhadap GDP



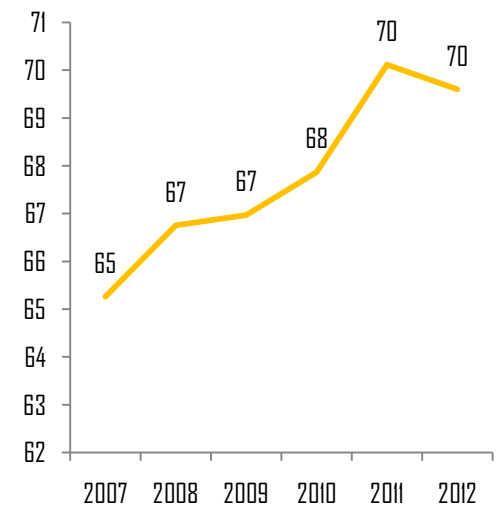
Sumber: World Development Indicator, World Bank

Inflasi



Sumber: Kenya National Bureau of Statistics

Emisi Gas Rumah Kaca (dalam MtCO₂e)



Sumber: CAIT Climate Data Explorer, WRI

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

1. Sustainable Finance Initiative (SFI) Guiding Principle (2015) – Asosiasi Perbankan

Panduan prinsip keuangan berkelanjutan ini dikeluarkan oleh asosiasi perbankan dan bersifat *voluntary*. Prinsip yang disusun diharmonisasikan dengan *international best practice standards*, seperti Equator Principle, IFC Sustainability Framework, Nigeria Sustainable Banking Principles, African Development Bank (AfDB) Green Growth Policy, Global Reporting Initiative (GRI) Reporting Guidelines, UNEP Finance Initiative (UNEP-FI) Guidelines, UN Global Compact Principles, ISO 26000:2010, Kenya's National Climate Change Policy (Draft), and the Kyoto Protocol. Terdapat lima prinsip: 1) *Financial Returns versus Economic Viability*; 2) *Growth through Inclusivity & Innovation*; 3) *Managing & Mitigating Associated Risks*; 4) *Resource Scarcity and Choice*; 5) *Business Ethics & Values*